ASESMEN TERPADU: PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA DI INDONESIA (*Integrated Assessment: Implementation of Restorative Justice to Countermeasure Drugs Crime in Indonesia*)

Nurul Huda¹, Yusuf Saefuddin², Seno Wibowo Gumbira³, Sumarji⁴

¹Fakultas Hukum Universitas Pekalongan

²Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto

³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka, Jakarta

⁴Kepolisian Republik Indonesia Resor Sragen

yusuf.saefudin12@ump.ac.id

Tulisan Diterima: 09-01-2019; Direvisi: 16-02-2020; Disetujui Diterbitkan: 17-02-2020

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.111-124>

ABSTRAK

Asesmen Terpadu merupakan strategi untuk mengefektifkan penegakan tindak pidana narkotika dengan menekan angka permintaan melalui upaya rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme Asesmen Terpadu dalam tindak pidana narkotika di Indonesia. Juga bermaksud menggali apakah Asesmen Terpadu sebagai paradigma baru mampu menekan angka permintaan narkotika (*demand reduction*) atau tidak. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini *Pertama*, bagaimana mekanisme Asesmen Terpadu dalam tindak pidana narkotika di Indonesia? *Kedua*, apakah Asesmen Terpadu mampu mengurangi permintaan (*demand reduction*) dalam penanggulangan kejahatan narkotika lintas negara? Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Data bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Asesmen Terpadu merupakan mekanisme yang dibentuk berdasarkan peraturan bersama guna menempatkan pecandu dan penyalahguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis/sosial. Asesmen Terpadu memberikan kesempatan besar kepada pecandu dan penyalahguna narkotika untuk direhabilitasi. Rehabilitasi merupakan salah satu cara guna menekan angka permintaan narkotika (*demand reduction*) yang akan berimplikasi pada penurunan angka peredaran gelap narkotika di Indonesia.

Kata Kunci: asesmen terpadu; pengurangan permintaan; kejahatan narkotika.

ABSTRACT

Integrated Assessment is a strategy to streamline the enforcement of criminal acts of narcotics by reducing demand through rehabilitation efforts for addicts and drug abusers. This paper aims to examine the mechanism of Integrated narcotics crime assessment in Indonesia. It also intends to explore whether Integrated Assessment as a new paradigm can reduce the demand for narcotics (reduced demand) or not. The problems examined in this study First, what is the mechanism for the Integrated Assessment of narcotics crimes in Indonesia? Second, is the Integrated Assessment able to reduce demand (address reduction) in overcoming cross-national narcotics crimes? The research method used in this study is normative juridical, with legal approaches, conceptual approaches, and

historical approaches. Data sourced from primary legal materials and secondary legal materials obtained were analyzed using qualitative analysis. The results of the study indicate that integrated assessment is a mechanism formed based on joint regulations to place drug addicts and abusers into medical / social rehabilitation institutions. Integrated assessment provides a great opportunity for addicts and drug abusers to be rehabilitated. Rehabilitation is one way to reduce the demand for narcotics (reducing demand) which will have implications for reducing the level of drug trafficking in Indonesia.

Keywords: *integrated assessment; demand reduction; drugs crime.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Permasalahan Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan serius di Indonesia. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia darurat narkoba dan menyerukan perang besar terhadap segala bentuk kejahatan narkoba.¹

Berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia tahun 2015 tentang *Survei Nasional Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba pada Kelompok Rumah Tangga*, diketahui bahwa angka prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia telah mencapai 2,20% atau 4.098.029 orang yang pernah pakai narkoba dalam setahun terakhir (*current users*)².

Tahun 2015, terjadi *trend* peningkatan kasus narkoba secara keseluruhan, peningkatan terbesar yaitu kasus narkoba dengan persentase kenaikan 23,58% dari 23.134 kasus di Tahun 2014 menjadi 28.588 kasus di Tahun 2015. Sedangkan berdasarkan penggolongan tersangka kasus narkoba tahun 2015, terjadi tren peningkatan tersangka kasus narkoba secara keseluruhan, jumlah tersangka narkoba tertinggi terjadi pada kasus narkoba dengan total 38.152 orang. Mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 7,98%.³

Peningkatan jumlah kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menjadikan kejahatan narkoba ini disebut sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa). Terkait dengan hal tersebut, *"Extraordinary crime must be treated with an extraordinary way. The increase of narcotics illicit trafficking number directly proportional to the number of narcotics addict and narcotics abuser increased. So, it needs massive and comprehensive handling. The pattern of narcotics crime case handling is continuously developing. Through National Narcotics Board, government intensified efforts to prevent, combat, and rehabilitation"*⁴. Narkoba merupakan kejahatan yang luar biasa, oleh karenanya perlu penanganan yang luar biasa juga. Pola penanganan kasus kejahatan narkoba terus berkembang. Melalui Badan Narkotika Nasional, pemerintah mengintensifkan upaya untuk mencegah, memberantas dan rehabilitasi pecandu dan penyalahguna narkoba.

Peningkatan jumlah pengguna narkoba menimbulkan berbagai fenomena sosial. Perubahan sosial (*social change*) yang cepat sebagai akibat proses modernisasi berpotensi menimbulkan keresahan dan ketegangan sosial (*social unrest and social tension*). Perubahan sistem nilai dengan cepat menuntut adanya norma-norma kehidupan sosial baru.⁵

1 Badan Narkotika Nasional, "Press Relases Akhir Tahun 2016, Keja Nyata Perangi Narkoba," Jakarta, 22 Desember 2016.

2 Badan Narkotika Nasional, "Press Release Akhir Tahun 2017" (2017): 1–6.

3 *Ibid*, 5.

4 Yusuf Saefudin, Agus Raharjo, and Budiono Budiono, "Urgency Of Integrated Assessment On Drugs Crime," *Jurnal Dinamika Hukum* 17, no. 1 (2017): 40–52.

5 Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit

Keadaan demikian ini menuntut adanya hukum yang terbuka terhadap perkembangan dan dinamika masyarakat di era globalisasi. Apa yang disebut modernisasi dan globalisasi tidak bersifat fakultatif, tetapi merupakan fenomena yang harus dihadapi (*change is not optional*) dan tidak dapat dihindari. Keduanya merupakan sesuatu yang alamiah yang timbul serta-merta akibat kompleksitas dan heterogenitas hubungan antar manusia sebagai masalah sosial sebagai akibat penemuan alat-alat teknologi modern.

Semakin meningkatnya proses modernisasi akibat ditemukannya alat-alat komunikasi modern, alat komunikasi dan teknologi informatika modern, isu modernisasi menjadi mendunia dan memunculkan fenomena baru berupa globalisasi yang menuntut perubahan struktur hubungan hukum (*legal structure*), substansi-substansi baru pengaturan hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*) yang seringkali sama sekali baru. Tanpa adanya perubahan sistem hukum tersebut akan timbul bahaya-bahaya terhadap ketentraman hidup (*peacefull life*) dalam berbagai kehidupan sosial, semua akan menjadi tidak pasti dan tidak tertib serta rasa tidak terlindungi⁶.

Menghadapi globalisasi yang semakin deras memasuki sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Anthony Giddens memikirkan "jalan ketiga" sebagai pilihan ketiga antara sosialisme dan kapitalisme, atau antara intervensi negara dan pasar bebas. Dunia pada penghujung abad ke-20 ini dicirikan oleh "*manufactured uncertainty*"⁷, yakni masa yang diliputi oleh ketidakpastian. Situasi ini tidak ditimbulkan oleh alam, tetapi oleh manusia sendiri berkat teknologi yang diciptakannya. Termasuk dalam hal ini pengaruhnya terhadap

munculnya berbagai jenis narkotika serta modus operandi yang digunakan dalam melancarkan peredaran gelapnya.

Kiki Rizqi Andini dalam penelitiannya menemukan bahwa tingginya peredaran narkoba di Indonesia salah satunya didukung oleh faktor globalisasi penggunaan teknologi seperti internet dan seperangkat alat lainnya membuat para pengedar narkoba mudah untuk menjangkau target tujuannya⁸. Penelitian ini mengurai pengaruh globalisasi dan berbagai perangkat modern terhadap tingginya peredaran narkoba di Indonesia, belum menyentuh pada strategi untuk mengatasi persoalan tersebut. Oleh karena itu, artikel ini mengkaji lebih lanjut tentang Asesmen Terpadu sebagai strategi pengurangan permintaan narkotika dan memutus jaringan narkotika sebagai akibat globalisasi.

Globalisasi juga memberikan pengaruh terhadap dunia farmasi. Mackey, T.K. dan Liang B.A. dalam penelitiannya melaporkan bahwa bentuk *Digital forms of direct-to-consumer pharmaceutical marketing* (eDTCA) atau pemesanan obat secara online langsung kepada pembeli telah mengglobal di era pertukaran informasi yang bebas dan terbuka seperti saat ini. Pemesanan obat melalui 'Apotek *online*' yang tidak sah/ilegal berisiko terhadap kesehatan masyarakat dan mengancam keselamatan pasien secara global.⁹ Perdagangan gelap narkotika tidak hanya berpengaruh terhadap kondisi

---

Universitas Diponegoro, 1997): 57.

6 *Ibid*, 58.

7 Anthony Giddens, *Beyond Life and Right* (Cambridge: Polity Press, 1994): 4.

---

8 Kiki Rizki Andini, "Kerjasama United Nation Office on Drugs and Crimes (UNODC) Dengan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Perdagangan Narkoba Di Indonesia," *eJournal Ilmu Hubungan Internasional* 3, no. 2 (2015): 233-244.

9 Mackey T.K. and Liang B.A., "Pharmaceutical Digital Marketing and Governance: Illicit Actors and Challenges to Global Patient Safety and Public Health," *Globalization and Health* 9, no. 1 (2013): 1-11.

ekonomi dan hukum negara kecil, tetapi mempengaruhi semua negara di dunia¹⁰.

Tahun 1890-an, AS dan pemerintah internasional mulai mengatur mengenai peredaran obat terlarang dengan berbagai cara. Termasuk dengan membatasi akses dan distribusi obat-obatan tertentu, menerapkan undang-undang yang mengharuskan pencatatan oleh dokter dan produsen, dan mengkriminalisasi penggunaan obat-obatan tertentu seperti opium, heroin, dan kokain¹¹.

Penyalahgunaan narkotika mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial¹². Pecandu dan penyalahguna narkotika adalah "orang sakit". Selayaknya memperlakukan orang sakit adalah dengan disembuhkan. Pecandu dan atau penyalahguna narkotika wajib menjalani pengobatan dengan menempatkan mereka kedalam lembaga rehabilitasi, baik medis maupun sosial.

Penempatan pecandu dan korban penyalahguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi sesuai dengan tujuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Selanjutnya UU Narkotika) sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 huruf d. Selain itu pasal 127 dengan memperhatikan Pasal 54, 55, dan 103 serta SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (SEMA Narkotika) merupakan landasan

hukum untuk menempatkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika kedalam lembaga rehabilitasi.

Penegakan hukum kasus tindak pidana narkotika pada muaranya berakhir pada penjatuhan pidana penjara. Data tahun 2014, mayoritas Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia diisi oleh narapidana narkotika yaitu sebesar 56.326 orang atau 92,39% dari 60.961 narapidana tindak pidana khusus¹³. Sebagian besar diantara mereka adalah pecandu dan penyalahguna narkotika. Oleh karenanya sangat tidak efektif apabila para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika ditempatkan dalam penjara untuk menjalani proses pembinaan. Pasal 54 UU Narkotika menyebut pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib direhabilitasi.

Secara umum, terdapat tiga strategi utama dalam mengatasi kejahatan narkotika lintas negara, yakni *demand reduction* (mengurangi permintaan), *Harm Reduction* (mengurangi dampak buruk) dan *supply reduction* (memutus jaringan).¹⁴ Upaya memutus jaringan telah dilakukan sejak lama, namun demikian tidak juga menghentikan jumlah peredaran gelap narkotika yang terjadi di Indonesia. Bilamana dilihat dari hukum ekonomi, fenomena masuknya narkotika dari berbagai penjuru dunia tidak lepas karena tingginya permintaan narkotika di Indonesia. Salah satunya adalah tingginya permintaan narkotika jenis sabu. Hal tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut:

10 Niklas Swanstrom, "The Narcotics Trade: A Threat to Security? National and Transnational Implications," *Global Crime* 8, no. 1 (2007): 1–25.
11 Rashi K. Shukla, Jordan L. Crump, and Emelia S. Chrisco, "An Evolving Problem: Methamphetamine Production and Trafficking in the United States," *International Journal of Drug Policy* 23, no. 6 (2012): 426–435.
12 Elrick Cristoper Sanger, "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika Di Kalangan Generasi Muda," *Jurnal Lex Crimen* 11, no. 4 (2015): 5-13.

13 Kementerian Hukum dan HAM, *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2014* (Jakarta, 2014): 48.
14 Yeni Handayani, "Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Narkotika" *Jurnal Rechtsvinding*, (2015): 1–5.

Gambar 1
Aliran Perdagangan Sabu-Sabu Antar Negara Tahun 2011 - 2014

Sumber: World Drugs Report 2016

Oleh karena itu, pemerintah dewasa ini menekankan juga pada aspek *demand reduction*, yakni menekan angka permintaan. Langkah diambil guna menekan angka permintaan tersebut adalah melalui penanganan pecandu dan penyalahguna narkotika yang lebih serius. Guna melancarkan langkah tersebut, dikeluarkanlah Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Peraturan tersebut mendasari dibentuk Tim Asesmen Terpadu, yang terdiri dari anggota BNN, Kepolisian, Kejaksaan dan Bappas. Tim inilah yang menentukan seseorang dinyatakan sebagai pecandu atau penyalahguna narkotika atau bukan. Kedudukannya dalam proses

peradilan pidana menjadi sangat penting. Hal ini mengingat bahwa kegagalan institusi lembaga negara dalam menekan peredaran narkotika saat ini disebabkan ketimpangan dalam menyatukan keputusan institusi tersebut dalam penanganan perkara penyalahgunaan narkotika.¹⁵

Dalam penelitian Yusuf Saefudin dikemukakan bahwa tujuan dibentuknya tim Asesmen Terpadu sangat baik. Namun perlu dipersiapkan sarana dan prasarana pendukungnya mengingat hal tersebut sangat krusial. Terutama adalah sarana rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Baik rehabilitasi medis maupun rehabiulitasi sosial.

Tulisan ini membahas mengenai paradigma baru dalam penanggulangan kejahatan narkotika di Indonesia melalui mekanisme Asesmen Terpadu. Penelitian sebelumnya lebih banyak mengkaji aspek hukumnya saja. Beberapa artikel juga dijumpai hanya melakukan kajian dari aspek

15 Muhar Juneff, "Forum makumjakpol-Bnn-Menkes-Mensos dalam penanganan tindak pidana narkotika", *JIKH*, Vol.11, No.3 (2017):305-336

medis saja. Berbeda dengan sebelumnya, artikel ini akan mengupas secara berimbang antara aspek hukum dan aspek medis dalam tindak pidana narkoba. Karena kedua aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait dalam proses Asesmen Terpadu. Bagaimana mekanisme atau cara kerja Tim Asesmen Terpadu tentunya menjadi sebuah pertanyaan awal yang akan dijawab dalam artikel ini. Kemudian yang patut didiskusikan berikutnya adalah mengenai apakah paradigma baru ini mampu menanggulangi dan memproteksi penduduk Indonesia, khususnya generasi muda dari ‘ancaman’ narkoba dari berbagai penjuru dunia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, permasalahan yang dikaji dalam artikel ini yaitu:

1. Bagaimanakah mekanisme Asesmen Terpadu dalam tindak pidana narkoba di Indonesia?
2. Apakah Asesmen Terpadu mampu mengurangi permintaan (*demand reduction*) dalam penanggulangan kejahatan narkoba lintas negara?

Tujuan

Tujuan penulisan artikel ini yakni: *pertama*, untuk mengkaji mekanisme Asesmen Terpadu dalam tindak pidana narkoba di Indonesia. *Kedua*, mengetahui implikasi asesmen terpadu terhadap pengurangan permintaan (*demand reduction*) narkoba lintas negara.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan berupa data sekunder

dengan bahan utama berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder berupa literatur buku-buku teks dan jurnal ilmiah mengenai Asesmen Terpadu dalam tindak pidana narkoba. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

PEMBAHASAN

1. Asesmen Terpadu dalam Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia

UU Narkoba mendefinisikan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba. Pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba berbeda. Perbedaan inilah yang akan berakibat dalam pola penanganannya, khususnya dalam proses peradilan pidananya. Pasal 1 angka 13 UU Narkoba menyebutkan, pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis.

Korban Penyalahgunaan narkoba tidak didefinisikan secara khusus dalam ketentuan umum. Pengertian korban penyalahgunaan narkoba terdapat dalam bagian penjelasan Pasal 54, bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang *tidak sengaja* menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba. Perlu ditekankan dalam pasal ini bahwa syarat dikatakan sebagai korban penyalahgunaan narkoba adalah karena ketidak sengajaannya seseorang menggunakan narkoba.

Penegakan hukum bukan seperti menarik garis lurus yang selesai dengan dibuatnya undang-undang dan diterapkan seperti sebuah mesin, sehingga tampak sederhana dan mudah (model mesin otomatis)¹⁶. Sejak

¹⁶ Agus Raharjo and Angkasa Angkasa, “Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum,” *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (2011):

Indonesia merdeka hingga saat ini penegakan hukum masih menjadi masalah utama yang dikeluhkan masyarakat. Banyaknya kasus hukum yang tidak diselesaikan atau selesai dengan akhir yang kurang memuaskan membuat hukum semakin tidak dipercaya masyarakat sebagai alat mencari keadilan¹⁷.

Tahap dan pemidanaan atau penjatuhan pidana pada hakikanya adalah alat untuk mencapai tujuan. Dalam mengidentifikasi tujuan pemidanaan konsep bertolak dari keseimbangan dua sarana pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana¹⁸. Berkaitan dengan konsep pemidanaan Agus Raharjo mengatakan bahwa pemberian pidana kepada pelaku kejahatan bukan sekadar penderitaan atau nestapa bagi pelaku sebagaimana diintrodusir oleh teori retributive dengan segala variasinya, atau merupakan upaya melindungi kepentingan masyarakat sebagaimana diungkapkan oleh teori relatif, akan tetapi lebih dari itu adalah agar pemidanaan harus dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pelaku kejahatan untuk menyadari kesalahannya, mengubah perilakunya dan jika perlu menjadi agen perubahan, atau dapat pula menumbuhkan kembangkan kesadaran untuk menyadari sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat dan martabat, rasa solidaritas maupun kemampuan untuk mengendalikan diri¹⁹.

Penanganan kasus tindak pidana narkotika dibutuhkan kehati-hatian dan perlu dilihat keseluruhan aspek hukumnya.

Jangan hanya memandang bahwa kejahatan narkotika (termasuk penyalahgunaan narkotika) sebagai ancaman serius bagi masyarakat, sehingga pelaku harus dihukum berat. Khusus bagi korban penyalahgunaan narkotika harus sejauh mungkin dihindarkan dari pidana penjara.

Perlu untuk diketahui, bahwa pada tahun 2014 di Indonesia ada sekitar 23.779 warga binaan pemasyarakatan merupakan pengguna narkoba yang sedang menjalani hukuman pidana di Lapas. Hal ini terjadi akibat pengguna narkoba diputus hukuman pidana, padahal pilihan hukuman rehabilitasi lebih baik diterapkan bagi pengguna narkoba.²⁰ Memidanakan bukan semata memberikan efek jera, namun bagaimana membuat pidana yang dijalani narapidana ini juga mampu menjadikan narapidana menjadi pribadi yang lebih baik. Kecenderungan memidanakan pecandu dan penyalahguna menjadi semakin buruk, maka solusi yang tepat adalah dengan merehabilitasi pecandu dan penyalahguna narkotika.

Kepentingan korban dalam perkara pidana sudah saatnya untuk diberikan perhatian khusus. Kalimat *pecandu dan penyalahguna narkotika adalah korban* sering disampaikan BNN dalam setiap kegiatan penyuluhan atau *press release* yang dibuatnya. Tidak semua pecandu adalah korban, karena ada pula seorang pengedar atau bandar yang kecanduan narkotika. Ada yang benar-benar korban, ada yang dikorbankan dan ada pula yang pura-pura sebagai korban. Pemahaman inilah yang juga perlu diluruskan.

Seorang yang benar-benar korban penyalahgunaan narkotika sesungguhnya dirinya tengah berada dalam kondisi yang sulit. Apa lagi mereka yang tertangkap dengan barang bukti karena dijebak, dicekoki,

---

389-401.

17 Hwian Christianto, "Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana," *Mimbar Hukum* 23 (2011): 431–645.

18 Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, ed. 5 (Jakarta: Pranadamedia, 2016): 94.

19 Agus Raharjo, *Berbagai Jenis Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika*. Makalah, Disampaikan dalam Seminar Nasional Mewujudkan Indonesia Bebas Narkotika Melalui Pendidikan Kepramukaan, Purwokerto, (Purwokerto, 2014): 5.

---

20 Anang Iskandar, "Dekriminalisasi Pengguna Narkoba Di Indonesia," *Majalah Sinar* 1 (2014): 15.

dipaksa untuk menggunakan narkoba. Kasus semacam ini marak terjadi akhir-akhir ini, khususnya dilakangan anak muda. Oleh karenanya, orang yang berada dalam kondisi semacam ini perlu diberikan perhatian dan penanganan yang cermat. Jangan sampai orang tersebut menjadi korban kedua kalinya karena harus berada dalam penjara.

Sanksi yang diatur dalam UU Narkotika menganut *double track system*, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan.²¹ Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk sanksi tindakan. Dalam Pasal 103 UU Narkotika ditegaskan bahwa hakim dapat memutus atau menetapkan pecandu narkoba untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan. Masa menjalani pengobatan dan atau perawatan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana. Hal ini selaras dengan salah satu tujuan dibentuknya UU Narkotika yakni untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkoba. Namun demikian, berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa hakim cenderung menjatuhkan sanksi pidana penjara pada pecandu. Akibatnya pecandu narkoba yang berada di lapas tidak diberi kesempatan untuk menjalani rehabilitasi, sehingga pelaksanaan rehabilitasi belum berjalan secara maksimal. Sampai saat ini program rehabilitasi narkoba di Lapas tidak berjalan optimal.²²

Paradigma baru dalam penanganan kasus tindak pidana narkoba ini timbul setelah ditandatanganinya Peraturan Bersama. Melalui peraturan tersebut, dibentuk tim asesmen terpadu yang berkedudukan di tingkat pusat, tingkat propinsi, tingkat kabupaten/kota terdiri dari tim dokter dan

tim hukum yang bertugas melaksanakan analisis peran tersangka yang ditangkap atas permintaan penyidik yang berkaitan dengan peredaran gelap narkoba terutama bagi pecandu.

Tim Asesmen terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Bersama mempunyai kewenangan;

- a) Atas permintaan Penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai korban Penyalahgunaan Narkoba, Pecandu Narkoba atau pengedar Narkoba.
- b) Menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna Narkoba sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara; dan
- c) Merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu Narkoba dan korban Penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pelaksanaan Asesmen dan analisis dilakukan oleh tim hukum bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dan penyalahgunaan narkoba berkoordinasi dengan Penyidik yang menangani perkara. Hasil asesmen tersebut sebagai kelengkapan berkas perkara berfungsi sebagai keterangan seperti *visum et repertum*. Hasil analisis akan memilah-milah peran tersangka sebagai penyalahguna, penyalahguna merangkap pengedar atau pengedar.²³

Sementara itu, tim dokter bertugas melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba.²⁴ Lebih jelasnya

21 Puteri Hikmawati, "Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkoba" 2, no. 2 (2011): 329–350.

22 Insan Firdaus, "Peranan pembimbing kemasyarakatan dalam upaya penanganan *overcrowded* pada lembaga pemasyarakatan" *JIKH*, Vol. 13, No. 3 (2019): 339-358

23 Riki Afrizal, Upita Anggunsur, "Optimalisasi Proses Asesmen Terhadap Penyalahguna Narkoba Dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagipecandu Narkoba", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol 19, No 3 (2019); 259-268

24 Yusuf Saefudin, Raharjo, and Budiono, "Urgency

mengenai pelaksanaan Asesmen Terpadu dalam tindak pidana narkotika dapat dilihat dalam bagan berikut:

Bagan 1
Alur Proses Pelaksanaan Asesmen Terpadu dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika di Indonesia

Sumber: Peraturan Bersama yang diolah

Secara kelembagaan, tujuan dari Asesmen Terpadu sudah sangat baik. Namun demikian, ada hal krusial yang berpotensi menjadikan sistem yang bagus ini menjadi tidak efektif. Salah satunya adalah belum siapnya Institusi penerima wajib lapor dalam melaksanakan program rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Sebagai contoh di RSUD Goeteng Tarunadibrata yang tidak memiliki anggaran rehabilitasi rawat jalan bagi pecandu narkotika, apa lagi sampai rawat inap. Kurniasih Dwi P. yang merupakan psikolog sekaligus anggota Tim Asesmen Terpadu mengungkapkan:

“Kami selama ini belum pernah menangani pasien untuk rawat inap. Sementara ini hanya rawat jalan itupun karena kerjasama dengan BNN. Anggaran untuk rawat inap sebagaimana Surat Edaran

Mahkamah Agung itu yang tidak dimiliki oleh kami”.²⁵

Belum siapnya sarana rehabilitasi merupakan hal krusial. Menjadi percuma apabila asesmen menyatakan seorang direhabilitasi, namun sarana rehabilitasi belum ada. Oleh karena itu, tersedianya berbagai sarana rehabilitasi menjadi penting, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Sementara itu, Peraturan Bersama tidak menyebutkan ketentuan yang jelas mengenai siapa yang dapat di asesmen dan apa syarat-syaratnya. Jangan sampai terjadi dimana seseorang yang seharusnya diasesmen tapi tidak diasesmen dan yang tidak seharusnya diasesmen tapi diasesmen. Maka dimungkinkan Asesmen Terpadu ini ‘menjadi celah’ seseorang menghindari dari pidana penjara dengan seolah-olah menganggap dirinya sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika.

Yusuf Saefudin dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa Asesmen Terpadu di Kabupaten Purbalingga menemukan bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai siapa yang dapat dilakukan asesmen. Antara kepolisian, BNN dan Kejaksaan mempunyai pandangan berbeda mengenai siapa yang dapat diasesmen. Kejaksaan menilai seluruh kasus tindak pidana narkotika perlu diasesmen. Disisi lain, kepolisian dan BNN mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial. Perbedaan pendapat tersebut lazim terjadi, mengingat bahwa sumber hukum yang dijadikan acuan adalah SEMA yang hanya mengikat hakim. Sementara penegak hukum lain tidak wajib mengikutinya.²⁶

Of Integrated Assessment On Drugs Crime (A Study in Purbalingga Regency)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 17 No. 1 (2017): 40-52

²⁵ *Ibid*, 49.

²⁶ *Ibid*, 50.

Lawrence M. Friedman, dalam teorinya mengenai sistem hukum menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas sub sistem-sub sistem hukum sebagai satu kesatuan yang saling berinteraksi²⁷. Sub sistem hukum dalam hal ini adalah substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga sub sistem inilah yang sangat menentukan apakah suatu sistem dapat berjalan atau tidak. Melihat ketidakjelasan mengenai syarat seseorang dapat dilakukan asesmen, pemerintah perlu segera membuat regulasi yang lebih konkrit. Sehingga dapat dijadikan pedoman bagi penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dengan baik.

Peran masyarakat sebagai kontrol sosial (*social control*) sangat berpengaruh terhadap lingkungan hidup manusia dan merupakan kaidah atau norma agar manusia dapat teratur dan saling menghormati. Faktor masyarakat juga sangat berperan dalam menentukan keterlibatan remaja dalam penyalahgunaan narkoba. Masyarakat yang tidak menerima latar belakang remaja yang tidak baik mengakibatkan timbulnya penyalahgunaan narkoba²⁸. Adanya peraturan yang baik, penegak hukum yang baik dan didukung budaya masyarakat yang baik akan sangat mendukung dalam penanganan pecandu dan penyalahguna narkoba.

2. Asesmen Terpadu: Menekan Angka Permintaan dan 'Jalan Kembali' Pecandu Narkoba

Pecandu narkoba telah menjadi masalah nasional dan bahkan internasional, karena dampaknya telah meluas di banyak negara. Secara nasional, peredaran narkoba telah menyebar ke setiap lapisan masyarakat, dari kelas atas ke kelas

bawah masyarakat. Jadi, hukum yang kuat diperlukan untuk melawannya, karena minat manusia dilibatkan.²⁹

Rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba dilaksanakan berdasarkan hasil asesmen. Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bersama menyebutkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Analisis Tim Asesmen terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba akan menghasilkan tiga kategori tingkat ketergantungan, yakni kelas berat, menengah dan kelas ringan dimana setiap tingkatan pecandu memerlukan rehabilitasi yang berbeda. Hal ini sangat diperlukan dalam rangka mengoperasionalkan Pasal 54 UU Narkoba dimana pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam kaitan ini diharapkan penyalahguna narkoba akan dijerat dengan pasal penyalahguna saja (Pasal 127 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba), dan selanjutnya hakim menggunakan Pasal 103 UU Narkoba dimana hakim dapat memutuskan atau menetapkan untuk memerintahkan pecandu menjalani rehabilitasi. Hakim sebagai tonggak penegak hukum pidana dituntut untuk dapat memberikan putusan pemidanaan yang tepat, dalam mengenakan pidana pada setiap kasusnya di dalam koridor hukum pidana

27 Lawrence M Friedman, *Legal System, The* (Russell Sage Foundation, 1975): 10.

28 Arif Dwi Atmoko and Imzacka Titah, "Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Dan Psikotropika Yang Ditangani Polwiltabes Surabaya," *Jurnal Hukum* XVIII, no. 18 (2010): 17-28.

29 Kadarudin, Husni Thamrin, and Yi-Ming Liao, "Drug-Related Crimes and Control in Indonesia and Taiwan: Cooperation Regarding Narcotics Smuggling Prevention and Countermeasures from the Point of View of International Law," *International Conference on Knowledge Management in Organizations*, (2018), 312-323.

dengan KUHAP sebagai ketentuan pokok hukum pidana materiil Indonesia³⁰

Posner mengemukakan bahwa analisa ekonomi mikro tentang hukum memiliki 2 (dua) aspek, yakni aspek analisis ekonomi positif dan aspek analisis ekonomi normatif.³¹ Aspek analisis ekonomi positif menitikberatkan pada efisiensi sebagai output dari suatu kebijakan sebagai bentuk intervensi masyarakat via kewenangan negara/pemerintah. Asesmen Terpadu ini menjadi jalan tengah sebagaimana yang dikemukakan Anthony Giddens sebelumnya. Jalan tengah ini merupakan pilihan terbaik dalam menekan angka permintaan narkotika (*demand reduction*). Mengingat bahwa para pecandu dan penyalahguna narkotika diupayakan untuk diberikan tindakan direhabilitasi dan sedapat mungkin dijauhkan dari pidana penjara yang akan memperburuk dirinya. Dari segi ekonomi tentunya jelas ini memberikan keuntungan berlipat. Potensi pecandu dan penyalahguna narkotika untuk pulih lebih besar. Disisi lain prinsip peradilan cepat biaya ringan dapat diwujudkan dalam kasus tindak pidana narkotika melalui Asesmen Terpadu ini.

Sedangkan, pada metode Analisis ekonomi normatif memandang bahwa sesuatu yang baik adalah yang memang secara ideal akan juga baik dan berlaku pada hal yang lain dan juga pada waktu yang lain, relevansinya terhadap hukum menjelaskan bahwa seorang hakim tidak hanya peduli atas putusannya di masa kini, melainkan juga harus dapat memprediksi dampak putusannya di masa depan karena putusan pengadilan yang merupakan preseden dapat mempengaruhi putusan mengenai suatu peristiwa di masa yang akan datang. Dalam hal ini, seorang hakim seharusnya dapat

memprediksi konsekuensi putusannya bagi kesejahteraan secara umum sehingga tidak menimbulkan kerugian yang tidak harus terjadi.³²

Apabila hakim mempertimbangkan kesejahteraan umum, maka setiap putusan pengadilan yang diambil memiliki nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang merupakan bagaian dari konsekuensi putusan. Sebagai contoh adalah Putusan No. 67/Pid.Sus/2016/PN.Pbg. dan Putusan No. No.82/Pid.Sus/2016/PN.Pbg. Seluruh terdakwa dalam putusan tersebut di vonis penjara, padahal yang bersangkutan berdasarkan hasil asesmen dalam kondisi ketergantungan narkotika dan perlu mendapatkan rehabilitasi.

Oleh karenanya, dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini, hakim perlu menelaah dan mempertimbangkan dengan cermat hasil Asesmen Terpadu. Apabila hakim yakin dengan merehabilitasi adalah jalan terbaik bagi seorang terdakwa, maka vonis tindakan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika merupakan pilihan terbaik guna menekan angka permintaan *demand reduction*.

Mekanisme Asesmen Terpadu dalam tindak pidana narkotika mampu menyentuh 2 aspek, yakni aspek hukum dan aspek medis.³³ Melihat kembali hakikat pemidanaan sebagaimana diungkapkan di atas, melalui asesmen terpadu aspek perlindungan/ pembinaan terhadap individu lebih diperhatikan. Karena merehabilitasi lebih bernilai positif dan memberikan kesempatan seorang pecandu dan penyalahguna narkotika menemukan 'jalan kembali' dalam kehidupannya yang lebih baik. Berbeda dengan memenjarakan yang berpotensi memperburuk kondisi pecandu dan penyalahguna narkotika. Perlu diingat kembali. Bahwa sekali lagi memidanakan

30 Agus Raharjo, "Mediasi Sebagai Basis Penyelesaian Perkara Pidana," *Mimbar Hukum* 20, no. 1 (2008): 93.

31 Richards Posner, *Economic Analysis of Law*, 8th ed. (Aspen Publishers, 2011): 365.

32 *Ibid*, 368.

33 Yusuf Saefudin, *Op.cit*, 48.

bukan semata memberikan efek jera, namun bagaimana membuat pelaku pidana menjadi pribadi yang lebih baik.

Secara keseluruhan, adanya Asesmen Terpadu dalam kasus tindak pidana narkoba ini relevan dengan perkembangan pola penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di dunia internasional. UNODC dalam *World Drugs Report* 2016 menyebutkan:

"The excessive use of imprisonment for drug-related offences of a minor nature is ineffective in reducing recidivism and overburdens criminal justice systems, preventing them from efficiently coping with more serious crime. The provision of evidence-based treatment and care services to drug-using offenders, as an alternative to incarceration, has been shown to substantially increase recovery and reduce recidivism"³⁴.

Pada pokoknya, UNODC menyerukan bahwa pidana penjara bagi pecandu narkoba tidak mampu mengurangi residivis penyalahguna narkoba. Perlu ada penanganan khusus berupa perawatan (rehabilitasi medis dan sosial) bagi pecandu narkoba sesuai dengan tingkat ketergantungannya.

Para pecandu dan penyalahguna narkoba perlu mendapatkan *treatment* khusus dalam rangka melepaskan dirinya dari ketergantungan narkoba.³⁵ Apabila dalam proses peradilan tersangka/terdakwa tidak mendapatkan perawatan khusus, maka bukan tidak mungkin tersangka/terdakwa ini mengalami sakaw, jatuh sakit dan pada akhirnya meninggal dunia. Hal inilah yang tidak diharapkan terjadi dalam proses peradilan. Sehingga hadirnya asesmen terpadu memberikan kemajuan dalam proses penegakan hukum, khususnya kasus tindak pidana narkoba. Besar harapan dengan

adanya Tim Asesmen Terpadu dalam penanganan tindak pidana narkoba ini dapat menjadi jawaban dalam mengatasi persoalan penanganan kasus tindak pidana narkoba di Indonesia.

Selanjutnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Braithwaite dan Strang yang dikutip oleh Eddy O.S Hiariej menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) pengertian keadilan restoratif yakni keadilan restoratif sebagai konsep proses dan keadilan restoratif sebagai konsep nilai³⁶. Pada keadilan restoratif sebagai konsep nilai mengandung nilai-nilai yang berbeda dari keadilan biasa karena menitikberatkan pada pemulihan dan bukan penghukuman. Dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa selain untuk mendapatkan treatment khusus dalam rangka melepaskan dirinya dari ketergantungan narkoba dengan merehabilitasi lebih bernilai positif yang memberikan kesempatan seorang pecandu penyalahguna narkoba menemukan 'jalan kembali' dalam kehidupannya yang lebih baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Asesmen Terpadu merupakan sebuah paradigma baru dalam penanganan kasus tindak pidana narkoba di Indonesia. Tim asesmen terpadu berkedudukan di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum. Hasil asesmen tersebut dijadikan sebagai kelengkapan berkas perkara dan berfungsi sebagai keterangan seperti *visum et repertum*. Melalui asesmen ini, seseorang juga akan diketahui kondisinya apakah mempunyai ketergantungan terhadap narkoba atau tidak, serta mengukur tingkat ketergantungannya guna menentukan tindakan rehabilitasi yang dibutuhkan.

34 Report, *World Drug Report*, vol. 1, p. 2.

35 *Ibid*, 3.

36 O. S. Edy Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016): 45.

Asesmen Terpadu mampu menyentuh aspek hukum dan aspek medis. Melalui asesmen terpadu aspek perlindungan/pembinaan terhadap individu lebih diperhatikan. Program rehabilitasi memberikan kesempatan seorang pecandu dan penyalahguna narkotika menemukan 'jalan kembali' dalam kehidupannya dan pada akhirnya bermuara pada tercapainya tujuan pidana yakni *restorative justice* bagi pecandu penyalahgunaan narkotika tersebut. Dan secara keseluruhan Asesmen Terpadu ini relevan dengan perkembangan pola penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di dunia internasional yang mampu menekan angka permintaan narkotika (*demand reduction*) dalam kejahatan transnasional

Saran

Pertama, perlu ada penyaman persepsi terhadap tersangka yang dapat dilakukan asesmen, sehingga tidak memunculkan argumentasi yang berbeda dalam satu tim. *Kedua*, perlu adanya penguatan lembaga rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika. Baik lembaga rehabilitasi medis maupun sosial yang dikelola pemerintah atau masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih sepenuhnya kami ucapkan kepada Bapak Moch. Najib Imanullah, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah Hukum dan Ekonomi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan bekal materi perkuliahan bagi kami. Sehingga tugas ini dapat terselesaikan terlepas dari segala kekurangan yang masih ada disana sini. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam penanggulangan tindak pidana narkotika lintas negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, Rizki, Upita Anggunsur, "Optimalisasi Proses Asesmen Terhadap Penyalahguna Narkotika Dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagipecandu Narkotika", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol 19, No 3 (2019); 259-268
- Agus Raharjo. "Mediasi Sebagai Basis Penyelesaian Perkara Pidana." *Mimbar Hukum* 20, no. 1 (2008): 93.
- Andini, Kiki Rizki. "Kerjasama United Nation Office on Drugs and Crimes (UNODC) Dengan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Perdagangan Narkoba Di Indonesia,." *eJournal Ilmu Hubungan Internasional* 3, no. 2 (2015): 237.
- Arif Dwi Atmoko, and Imzacka Titah. "Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika Yang Ditangani Polwiltabes Surabaya." *Jurnal Hukum XVIII*, no. 18 (2010): 23.
- Badan Narkotika Nasional. "Press Relases Akhir Tahun 2016, Keja Nyata Perangi Narkotika." *Jakarta*, 22 Desember 2016.
- . "Press Release Akhir Tahun 2017" (2017): 1–6.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Edited by 5. Jakarta: Pranadamedia, 2016.
- Christianto, Hwian. "Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana." *Mimbar Hukum* 23 (2011): 431–645.
- Friedman, Lawrence M. *Legal System, The*. Russell Sage Foundation, 1975.
- Giddens, Anthony. *Beyond Life and Right*. Cambridge: Polity Press, 1994.
- HAM, Kementerian Hukum dan. *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2014*. Jakarta, 2014.
- Handayani, Yeni. "Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Narkotika" (2015): 1–5.
- Hiariej, O. S. Edy. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

- Hikmawati, Puteri. "Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika" 2, no. 2 (2011): 329–350.
- Insan Firdaus, "Peranan pembimbing kemasyarakatan dalam upaya penanganan *overcrowded* pada lembaga pemasyarakatan" *JIKH*, Vol. 13, No. 3 (2019): 339-358
- Iskandar, Anang. "Dekriminalisasi Pengguna Narkoba Di Indonesia." *Majalah Sinar* 1 (2014): 15.
- Kadarudin, Husni Thamrin, and Yi-Ming Liao. "Drug-Related Crimes and Control in Indonesia and Taiwan: Cooperation Regarding Narcotics Smuggling Prevention and Countermeasures from the Point of View of International Law." 312–323, 2018.
- MuharJunef, "Forum makumjakpol-Bnn-Menkes-Mensos dalam penanganan tindak pidana narkotika", *JIKH*, Vol.11, No.3 (2017): 305-336
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997.
- Posner, Richards. *Economic Analysis of Law*. 8th ed. Aspen Publishers, 2011.
- Raharjo, Agus. *Berbagai Jenis Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika*. Purwokerto, 2014.
- Raharjo, Agus, and Angkasa Angkasa. "Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (September 2011).
- Report, World Drug. *World Drug Report. Journal of Policy Analysis and Management*. Vol. 1, 2007.
- Saefudin, Yusuf, Agus Raharjo, and Budiono Budiono. "Urgency Of Integrated Assessment On Drugs Crime." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 17, no. 1 (2017): 40–52.
- Sanger, Elrick Cristoper. "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda." *Jurnal Lex Crimen* 11, no. 4 (2015).
- Shukla, Rashi K., Jordan L. Crump, and Emelia S. Chrisco. "An Evolving Problem: Methamphetamine Production and Trafficking in the United States." *International Journal of Drug Policy* 23, no. 6 (2012): 426–435.
- Swanstrom, Niklas. "The Narcotics Trade: A Threat to Security? National and Transnational Implications." *Global Crime* 8, no. 1 (2007): 1–25.
- T.K., Mackey, and Liang B.A. "Pharmaceutical Digital Marketing and Governance: Illicit Actors and Challenges to Global Patient Safety and Public Health." *Globalization and Health* 9, no. 1 (2013).